



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN KECUBUNG I NO. 4 TELP. (0361) 228713 DENPASAR

**Laporan Triwulan III Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah
Kota Denpasar**

**BAB I
Pendahuluan**

A. Latar Belakang

Penilaian risiko dilaksanakan untuk meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi pembangunan daerah yaitu Denpasar kota berbudaya dilandasi Tri Hita Karana; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

D. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024.

BAB II

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan III

1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 8 risiko (populasi risiko), dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1. (form 4)** terdiri dari 2 risiko strategis dan 6 risiko operasional

2. Analisis risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 8 jumlah risiko (**jumlah di form 4**) risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagain dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 0 (nol) risiko (0.% dari 8 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 2 (form 5)**.
- b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 8 (delapan) risiko atau 100 % dari jumlah/populasi risiko prioritas).(**Form 7**)
- c. Sebanyak 8 (delapan) risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 3 (form 7)**.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan III

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada Triwulan III sebanyak 1 (SATU) kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 4. (form 8)** atas perencanaan TW I pelaporan.
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada Triwulan III sebanyak 6 (enam) atau 50 % dari 8. kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 5 (form 9)**.
3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

BAB III

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian antara lain :

- a. belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda
- b. Kurangnya pemahanan personil terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP Kota Denpasar masih belum memadai

BAB IV
Monitoring Risiko dan RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul pada Triwulan III.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Pengelolaan risiko Satpol PP Kota Denpasar tahun 2024 ini memuat hasil identifikasi resiko kegiatan, dampak resiko, analisis resiko, serta status resiko yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilaksanakan. Laporan yang disusun dan dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Denpasar berdasarkan Renstra 2021-2026.

B. SARAN

Agar hasil dari monitoring pengelolaan risiko dapat ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan dalam proses perjalanan kegiatan. serta segera menyamakan persepsi terkait risiko-risiko kegiatan yang akan ada kedepannya.

Denpasar, 5 September 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar



Anak Agung Puuh Bawa Nendra, SH., M.Si
NIP. 6704181997031002

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	: PEMERINTAH KOTA DENPASAR				
Tahun Penilaian	: 2024				
Tujuan Strategis	: meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar				
Urusan Pemerintahan	:URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=dxe</i>
I	Risiko Strategis Pemda				0
1	Belum Optimalnya Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perwali;	RSP.24.05.10.01	2	2	4
II	Risiko Strategis OPD				
	Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja				
1	Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.	RSO.24.05.10.01	2	2	4
2	belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda	RSO.24.05.10.02	2	2	4

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=dxe</i>
III	Risiko Operasional OPD				
	Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja				
1	Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwali yang ditertibkan tidak sesuai target	ROO.24.05.10.01	2	2	4
2	Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target	ROO.24.05.10.02	2	2	4
3	terkendalanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.24.05.10.03	2	2	4
4	terkendalanya Pemenuhan kebutuhan Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Instalasi penerangan Kantor	ROO.24.05.10.04	2	2	4
5	terkendalanya pembayaran honor pegawai kontrak	ROO.24.05.10.05	2	2	4
6	terkendalanya pemeliharaan kendaraan operasional kantor dan pemeliharaan gedung kantor	ROO.24.05.10.06	2	2	4
7	Terkendalanya Pengadaan barang milik daerah	ROO.24.05.10.07	2	2	4
8	Terkendalanya pengadaan pakaian dinas	ROO.24.05.10.08	2	2	4

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda	: PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar
Urusan Pemerintahan	:URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
I	Risiko Strategis Pemda					
	Belum Optimalnya Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perwali;	RSP.24.05.10.01	2	Kepala OPD	perilaku tidak kooperatif dari pelanggar perda saat ditertibkan, dan kurangnya wawasan personil / aparat dalam proses penegakkan perda	adanya pelanggaran perda/perwali yang masih belum tertangani
II	Risiko Strategis OPD					
	Nama OPD : Satpol PP					
1	Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.	RSO.23.05.10.01	2	Kepala OPD	Belum Optimalnya Peningkatan peranan Satpol PP Kota Denpasar dalam deteksi dan cegah dini terhadap	Masih terdapatnya pelanggaran perda dan gangguan tramtibum yang terjadi di Kota Denpasar yang tidak terdeteksi sejak awal

					pelanggaran perda dan perwali	
2	belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda	RSO.23.05.10.02	2	Kepala OPD	Kurang Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penegakan perda	Terdapat pelanggaran perda/perwali yang masih belum tertangani secara optimal
III	Risiko Operasional OPD					
	Nama OPD: Satpol PP					
1	Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target	ROO.24.05.10.01	2	Kepala Bidang	Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perwali di Kota Denpasar .	Terdapat pelanggaran perda/perwali yang masih belum tertangani secara optimal
2	Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target	ROO.24.05.10.02	2	Kepala Bidang	pelanggar tramtibum tidak bersikap kooperatif saat ditertibkan	Tidak tercapainya target penyelesaian pelanggaran tramtibum di Kota Denpasar
3	terkendalanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.24.05.10.03	2	Sekretaris	Sistem / jaringan error pada saat pembuatan / pengajuan gaji	terlambatnya pembayran gaji dan tunjangan ASN

4	terkendalanya Pemenuhan kebutuhan Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Instalasi penerangan Kantor	ROO.24.05.10.04	2	Sekretaris	harga barang yang tidak stabil serta keterlambatan penyedia dalam mengirim barang kebutuhan kantor	Operasional kantor terganggu
5	terkendalanya pembayaran honor pegawai kontrak	ROO.24.05.10.05	2	Sekretaris	Sistem / jaringan error pada saat pembuatan / pengajuan honor pegawai kontrak	terlambatnya pembayran honor pegawai kontrak
6	terkendalanya pemeliharaan kendaraan operasional kantor dan pemeliharaan gedung kantor	ROO.24.05.10.06	2	Sekretaris	penanggung jawab kendaraan / aset kantor tidak secara rutin mengecek sarana / prasarananya	terganggunya kegiatan rutin satpol ppyang memerlukan sarana / prasarana kantor
7	Terkendalanya Pengadaan barang milik daerah	ROO.24.05.10.07	2	PPK	kendala mencari produk ber TKDN	terkendalanya upaya peremajaan sarana prasarana satpol PP
8	Terkendalanya pengadaan pakaian dinas	ROO.24.05.10.08	2	PPK	kendala pengadaan tidak tepat waktu	terlambatnya penyediaan pakaian dinas

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	: PEMERINTAH KOTA DENPASAR						
Tahun Penilaian	: 2024						
Tujuan Strategis	: meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar						
Urusan Pemerintahan	:URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
I	Risiko Strategis Pemda						
	Belum Optimalnya Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perwali;		SOP Penertiban Satpol PP	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan			

II	Risiko Strategis OPD						
	Nama OPD: Satpol PP						
1	Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.	RSO.24.05.10.01	SOP Penertiban Satpol PP	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	Meningkatkan pengetahuan Aparat mengenai Deteksi dan Cegah Dini dalam upaya penanganan pelanggaran perda	Kepala OPD	tw III 2024
2	belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda	RSO.24.05.10.02	SOP Penertiban Satpol PP	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan instansi terkait	Kepala OPD	tw III 2024

III	Risiko Operasional						
	Nama OPD : Satpol PP						
1	Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target	ROO.24.05.10.0 1	SOP Penertiban Satpol PP	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	Mengedepankan upaya persuasif dalam Penegakkan perda dan meningkatkan Kompetensi personil/aparat	Kepala Bidang	1 Tahun Anggaran
2	Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target	ROO.24.05.10.0 2	SOP Penertiban Satpol PP	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	Melakukan pendataan lebih awal di wilayah yang banyak terdapat potensi gangguan tramtibum, serta lebih intensif melakukan penertiban secara berkala dengan membuat aplikasi pengaduan	Kepala Bidang	1 Tahun Anggaran
3	terkendalanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.24.05.10.0 3	SOP Pembayaran Gaji	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar	sekretaris	1 Tahun Anggaran

4	terkendalanya Pemenuhan kebutuhan Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Instalasi penerangan Kantor	ROO.24.05.10.0 4	SOP pengajuan SPJ	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	berkoordinasi dengan penyedia terkait harga barang dan pengiriman barang	sekretaris	1 Tahun Anggaran
5	terkendalanya pembayaran honor pegawai kontrak	ROO.24.05.10.0 5	SOP Pembayaran Gaji	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar	sekretaris	1 Tahun Anggaran
6	terkendalanya pemeliharaan kendaraan operasional kantor dan pemeliharaan gedung kantor	ROO.24.05.10.0 6	SOP Pemeliharaan aset	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	melakukan pengecekan rutin kondisi aset dan kendaraan	sekretaris	1 Tahun Anggaran

7	Terhambatnya proses pemilihan penyedia	ROO.24.05.10.06	1. Perwali No 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi 2. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	Pemanfaatan SIKAP LKPP dalam pemilihan penyedia barang/jasa dan Pengadaan barang/jasa melalui SPSE	sekretaris	1 Tahun Anggaran
8	kendala mencari produk ber TKDN	ROO.24.05.10.06	1. Perwali No 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi 2. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan	Pemanfaatan SIKAP LKPP dalam pemilihan penyedia barang/jasa dan Pengadaan barang/jasa melalui SPSE	sekretaris	1 Tahun Anggaran

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar
 Urusan Pemerintahan :URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaa n	Realisasi Waktu Pelaksanaa n	Keteranga n
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
I	Risiko Strategis Pemda						
	Belum Optimalnya Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perwali;	Sosialisasi Perda kepada aparat / masyarakat	Bagian Hukum	Aparat Satpol PP / Masyarakat	TW IV 2024		

II	Risiko Strategis OPD						
	Nama OPD: Satpol PP						
1	Meningkatkan pengetahuan Aparat mengenai Deteksi dan Cegah Dini dalam upaya penanganan pelanggaran perda	Sosialisasi Perda kepada aparat	Bagian Hukum	Aparat Satpol PP	TW IV 2024		
2	Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan instansi terkait	Rapat / koordinasi	Bagian Hukum/ Kejaksanaan / Pengadilan / TNI / Polri / OPD terkait lainnya	Bagian Hukum/ Kejaksanaan / Pengadilan / TNI / Polri	TW III 2024		
III	Risiko Operasional						
	Nama OPD: Satpol PP						
1	Mengedepankan upaya persuasif dalam Penegakkan perda dan meningkatkan Kompetensi personil/aparat	Penertiban / Sosialisasi Perda kepada masyarakat	Bagian Hukum/OPD terkait lainnya	Aparat Satpol PP / Masyarakat	1 Tahun Anggaran		

2	Melakukan pendataan lebih awal di wilayah yang banyak terdapat potensi gangguan tramtibum, serta lebih intensif melakukan penertiban secara berkala dengan membuat aplikasi pengaduan	Penertiban / Sosialisasi Perda	Bagian Hukum	Aparat Satpol PP / Masyarakat	1 Tahun Anggaran		
---	---	--------------------------------	--------------	-------------------------------	------------------	--	--

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis : meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar
 ::URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN
 DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

Urusan Pemerintahan MASYARAKAT

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
1	Meningkatkan pengetahuan Aparat mengenai Deteksi dan Cegah Dini dalam upaya penanganan pelanggaran perda	Sosialisasi Perda kepada aparat	Kepala OPD	TW III Tahun 2024	TW III Tahun 2024	
2	Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan instansi terkait	Rapat / koordinasi	Kepala OPD	TW IV Tahun 2024	TW IV Tahun 2024	

3	Mengedepankan upaya persuasif dalam Penegakkan perda dan meningkatkan Kompetensi personil/aparat	Penertiban / Sosialisasi Perda kepada masyarakat	Kepala Bidang	1 Tahun Anggaran	Setiap tahun	
4	Melakukan pendataan lebih awal di wilayah yang banyak terdapat potensi gangguan tramtibum, serta lebih intensif melakukan penertiban secara berkala	Penertiban / Sosialisasi Perda	Kepala Bidang	1 Tahun Anggaran	Setiap tahun	
5	melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar	pemeliharaan secara berkala	Sekretaris	1 Tahun Anggaran	Setiap tahun	
6	berkoordinasi dengan penyedia terkait harga barang dan pengiriman barang	Koordinasi secara berkala	Sekretaris	1 Tahun Anggaran	Setiap tahun	

7	melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar	pemeliharaan secara berkala	Sekretaris	1 Tahun Anggaran	Setiap tahun	
8	melakukan pengecekan rutin kondisi aset dan kendaraan	pemeliharaan secara berkala	Sekretaris	1 Tahun Anggaran	Setiap tahun	

Denpasar, 5 September 2024



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar

Anak Agung Nendrah Bawa Nendra, SH., M.Si
NIP. 6704181997031002